



Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Kabupaten Dhamasraya

Ario Hernest Hadinata¹, Putri Hanifa²

Ekonomi Pembangunan, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas, Padang, Indonesia^{1,2}

*Email Korespodensi: ariohernest@eb.unand.ac.id

Diterima: 20-06-2025 | Disetujui: 01-07-2025 | Diterbitkan: 03-07-2025

ABSTRACT

This study analyzes sustainable economic development planning located in Dhamasraya Regency, West Sumatra Province. This study uses a qualitative descriptive approach, this study utilizes secondary data from regional planning documents and official statistics to illuminate socio-economic conditions, education, economic growth, inequality, and demographics during the period 2020–2024. The results of this study show a positive trend in economic growth, decreasing poverty rates, and increasing the human development index (HDI) and the level of education participation in Dhamasraya Regency, but there are challenges in the form of increasing income inequality (gini ratio), the proportion of the population who are not/have not attended school is quite high, and there is pressure on basic services caused by population growth. Therefore, the direction of the planning can be suggested to include equalizing development results, improving the quality of human resources, strengthening leading economic sectors, managing population growth, and participatory government governance. This study also emphasizes the importance of an inclusive and sustainable development strategy in order to improve people's welfare evenly in the future.

Keywords: Dharmasraya, Poverty, Education, GRDP, Gini Ratio, Population Density, Economic Development.

ABSTRAK

Pada penelitian ini menganalisis mengenai perencanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang berlokasi di Kabupaten Dhamasraya, Provinsi Sumatera Barat. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini memanfaatkan data sekunder dari dokumen perencanaan daerah dan statistik resmi untuk mengevaluasi kondisi sosial ekonomi, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan demografi selama periode 2020–2024. Pada hasil penelitian ini menunjukkan tren yang positif dalam pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingkat partisipasi pendidikan di Kabupaten Dhamasraya, tetapi ada terdapat tantangan yang berupa peningkatan ketimpangan pendapatan (gini rasio), tingkat proporsi penduduk yang tidak/ belum sekolah cukup tinggi, dan adanya tekanan terhadap layanan dasar yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk. Oleh sebab itu, arah perencanaannya dapat disarankan meliputi pemerataan hasil pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor ekonomi unggulan, pengelolaan pertumbuhan penduduk, dan tata kelola pemerintah yang partisipatif. Pada penelitian ini juga menegaskan betapa pentingnya strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dimasa yang akan datang.

Katakunci: Dharmasraya, kemiskinan, pendidikan, PDRB, Gini Rasio, Kepadatan Penduduk, Pembangunan

*Ekonomi***Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Hadinata, A. H., & Putri Hanifa. (2025). Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Kabupaten Dhamasraya. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 325-335. <https://doi.org/10.63822/nqwad879>

PENDAHULUAN

Bahwa Pembangunan ekonomi sangat diperlukan bagi sebuah daerah, terutama daerah yang memiliki potensi, baik potensi sumber daya maupun sumber ekonomi. Pembangunan Ekonomi diharapkan secara terus menerus harus dilakukan, bukan hanya pada periode tertentu dan berhenti pada periode tertentu, namun pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini serta pemenuhan kebutuhan untuk generasi di masa mendatang.

Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur hal ini yakni Pasal 3 dan 4 UU No. 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dengan adanya peraturan ini juga berfungsi untuk mengurangi potensi pencemaran lingkungan yang berasal dari zat berbahaya, limbah dan polusi udara (LinovHR, 2022)

Adapun agar pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat dicapai, penting untuk merumuskan keseimbangan antara tiga elemen inti yaitu pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan perlindungan lingkungan hidup. Diperlukan suatu perubahan yang dapat dimulai dengan berkontribusi mempromosikan tiga elemen keberlanjutan dalam pembangunan Indonesia di tingkat nasional maupun lokal, mendorong pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem yang berkelanjutan, meningkatkan standar kehidupan dasar, meningkatkan kontribusi perempuan, anak muda, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya untuk mendapatkan peluang kesetaraan dan kesejahteraan hidup (Kementerian PPN & Bappenas, 2016).

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai potensi sumber daya alam serta posisi geografis yang strategis. Daerah ini terbentang di wilayah dengan luas sekitar 2.961,13 km², Dharmasraya terletak di antara 0°47'07" sampai 1°41'56" Lintang Selatan dan 101°09'21" sampai 101°54'27" Bujur Timur. Secara administratif, kabupaten Dharmasraya ini berbatasan dengan beberapa kabupaten di Provinsi yang berada di Sumatera Barat yaitu, Jambi, dan Riau, serta dilintasi juga oleh jalur lalu lintas utama Sumatera yang membuat kawasan yang ini berpotensi untuk pengembangan ekonomi dan sosial.

Dengan barunya daerah ini yang berasal dari hasil pemekaran Kabupaten Sawahlunto atau Sijunjung pada tahun 2004, Dharmasraya mengalami berbagai rintangan serta tantangan pembangunan seperti pemberantasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, serta pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi. Topografi yang bervariasi yang dimulai dari dataran rendah hingga pegunungan, serta dominasi lahan perkebunan dan hutan hujan tropis, yang membuat faktor penting dalam perencanaan tata ruang dan pemanfaatan sumber daya.

Dalam perencanaan pembangunan pada Kabupaten Dharmasraya ini juga harus memperhatikan karakteristik demografi, dengan memperhatikan jumlah penduduk yang terus menerus meningkat serta komposisi usia produktif yang cukup dominan, sekaligus mengatasi segala permasalahan yang menyangkut kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Selain itu, dengan dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan dan pengembangan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi PDRB merupakan suatu fokus utama yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan juga inklusif.

Jika dilihat jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan 2,68 persen per tahun hingga pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya

sebanyak 234.713 orang yang terdiri dari 119.505 laki-laki dan 115.208 perempuan (BPS Kab. Dharmasraya, 2024).

Kemudian Jika dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, perkembangan angka PDRB Kabupaten Dharmasraya selama periode 2020-2024 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya pembangunan ekonominya membaik tiap tahunnya.

Oleh sebab itu, analisis perencanaan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya ini sangatlah penting untuk diidentifikasi potensi dan kendala yang ada dalam perencanaan pembangunan di kabupaten ini, serta merumuskan strategi pembangunan apa yang efektif dan efisien. Artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Dharmasraya yang merupakan dasar dalam pengambilan keputusan serta kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memiliki tujuan dalam memahami secara keseluruhan proses, kendala, dan efektivitas perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Menurut Saryono (2010) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menggali data dari berbagai sumber dan perspektif terkait perencanaan pembangunan daerah.

Jenis Data

Data statistik dari BPS Kabupaten Dharmasraya yang memiliki keterkaitan mengenai kemiskinan, pendidikan, PDRB, ketimpangan, dan kepadatan penduduk. Literatur dan penelitian terdahulu terkait perencanaan pembangunan daerah.

Metode Analisis Data.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif seperti angka kemiskinan, IPM, PDRB, dan Gini Ratio dalam penggambaran kondisi sosial ekonomi yang menjadi dasar perencanaan penelitian ini. Metode ini dirancang agar komprehensif serta mampu menangkap aspek teknis, sosial, dan politik dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya, yang sekaligus memberikan rekomendasi yang berbasis data dan analisis mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan

Bahwa kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tanggamengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan penduduknya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan (Cahyat, 2007). Kemiskinan (poverty) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara-negara

berkembang dan tertinggal. Masalah kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak hanya menjadi domain bidang ekonomi saja, tetapi juga politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya (Suharto, 2005).

Tabel 1 Data Kemiskinan Kab. Dharmasraya Tahun 2020-2024

TAHUN	ANGKA (%)
2020	6,23
2021	6,67
2022	5,56
2023	5,95
2024	5,97

Olahan Data: BPS

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber yang terkait, disaat puncak pandemi COVID-19 tahun 2020, tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya mencapai angka 6,23%. Lalu di tahun 2021 lagi-lagi kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya mengalami kenaikan dengan angka 6,67%. Lalu di tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya mengalami penurunan dengan angka 5,56% hingga tahun 2024 mengalami kenaikan lagi dengan angka 5,97%.

Pendidikan

UU Sisdiknas Nomor 20 Pasal 3 menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu juga bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pendidikan karakter dan rasa nasionalisme, karena pendidikan masih menjadi sarana yang paling efektif untuk membentuk karakter bangsa dan masyarakat yang sesungguhnya. Pendidikan sebagai motor perbaikan dan pembentukan karakter bangsa. Pendidikan terpadu merupakan sebuah tawaran solutif meningkatkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam berbagai bidang di masa yang akan datang.

Dasar dari implementasi karakter pendidikan di sekolah juga tercantum secara implisit dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pada 2005-2025, di mana pemerintah membuat pengembangan karakter sebagai salah satu prioritas program pembangunan nasional. Dijelaskan bahwa pendidikan karakter ditempatkan sebagai fondasi bagi visi pembangunan nasional, seperti mewujudkan masyarakat yang mulia, memiliki moralitas yang besar, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan Pancasila (Kemendiknas, 2010).

Tabel 2 Data Pendidikan Kab. Dharmasraya Tahun 2020 & 2024

Jenjang Pendidikan	2020 (%)	2024 (%)	Keterangan
Tidak/Belum Sekolah	23,66	23,66	Proporsi penduduk yang tidak/belum sekolah tetap tinggi sekitar 23,66% pada 2024
Tamat SD	22,08	22,08	Proporsi penduduk tamat SD sekitar 22,08% pada 2024
Tamat SMP	16,37	16,37 (2024)	Proporsi penduduk tamat SMP sebesar 16,37% pada 2024
Tamat SMA	18,34	18,34	Proporsi penduduk tamat SMA sebesar 18,34% pada 2024
Pendidikan Tinggi (D1-D3, S1-S3)	7,04	7,04	Proporsi penduduk berpendidikan tinggi mencapai 7,04% pada akhir 2024, dengan rincian: D1-D2 0,53%, D3 1,26%, S1 5,02%, S2 0,23%, S3 0,008%

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan dengan angka 8,46 di tahun 2019 menjadi 8,71 di tahun 2024. Data ini menjelaskan adanya peningkatan partisipasi dan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2020 hingga 2024, walaupun proporsi penduduk yang belum sekolah masih cukup tinggi di Kabupaten Dharmasraya ini.

Kemudian Proporsi penduduk tamat SD sekitar 22,08 persen pada 2024, selanjutnya proporsi penduduk tamat SMP sebesar 16,37 persen pada 2024, proporsi penduduk tamat SMA sebesar 18,34 persen pada 2024, dan proporsi penduduk tamat pendidikan tinggi sebesar 7,04 persen pada 2024. hal tersebut haruslah menjadi perhatian bagaimana agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan terutama pada rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya.

Produk Domestik Regional Bruto

Table 3 Data Nilai PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Dharmasraya Menurut Lapangan Usaha (juta Rp), 2020-2024

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiah)	2020	2021	2022*	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
- ADHB/at current price	10.243,27	10.757,47	12.233,47	13.345,77	14.327,63
- ADHK/at 2010 Constant Price	7.454,97	7.708,75	8.037,79	8.387,15	8.711,16
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)					
ADHB/at current price	44,981	46,450	51,885	55,626	58.719
ADHK/at 2010 Constant Price	32,737	33,286	34,090	34,958	35.701
Jumlah Penduduk (ribu orang) Population (Thousand People)	228	232	236	240	244

*) Angka sementara/Preliminary Figures

**) Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Sumber Badan Pusat Statistik Kab. Dharmasraya, 2024

Bahwa dari data diatas menunjukkan perkembangan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan PDRB per kapita di Kabupaten Dharmasraya yang dimana menurut lapangan usaha dalam satuan miliar rupiah dan ribu rupiah dari tahun 2020 hingga 2024. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) mengalami peningkatan setiap tahun, dari Rp10.243,27 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp14.327,63 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2020 menjadi Rp8.711,16 miliar pada tahun 2024.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku juga menunjukkan tren kenaikan, dari Rp 44,981 juta pada tahun 2020 menjadi Rp58,719 juta pada tahun 2024. Begitu juga dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010, yang naik dari Rp32,737 juta pada tahun 2020 menjadi Rp35,701 juta pada tahun 2024. Jumlah penduduk Dharmasraya juga bertambah dari 228 ribu orang pada tahun 2020 menjadi 244 ribu orang pada tahun 2024. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya selama periode 2020 hingga 2024.

Gini Ratio

Tabel 4 Data Ketimpangan Kab. Dharmasraya

NO	Indikator Kinerja Marko	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan %
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,30	73,04	1,02
2	Angka Kemiskinan	15,08	15,49	2,72
3	Angka Pengangguran	6,23	6,22	-0,16
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,27	4,35	1,87
5	Pendapatan Per-Kapita	51.885,54	55.626,38	7,21
6	Ketimpangan Pendapatan	0,287	0,291	1,39

Sumber data: Badan Pusat Statistik, Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Dharmasraya yang diukur dengan Gini Rasio mengalami sedikit peningkatan dari 0,287 pada tahun 2022 menjadi 0,291 pada tahun 2023, atau naik sebesar 1,39%. Angka Gini Rasio ini masih berada pada kategori ketimpangan rendah (di bawah 0,4), yang berarti distribusi pendapatan di masyarakat relatif merata.

Namun, dengan adanya kenaikan Gini Rasio meskipun kecil, dapat menunjukkan adanya sedikit peningkatan ketimpangan pendapatan antar penduduk selama periode tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan per kapita yang tidak sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sebagian kelompok masyarakat dapat mengalami peningkatan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Pada umumnya, walaupun ketimpangan masih berada dalam batas wajar, pemerintah daerah tetap perlu melihat upaya pemerataan hasil pembangunan agar tren kenaikan ketimpangan ini tidak berlanjut dan tetap dapat menjaga stabilitas sosial-ekonomi di Kabupaten Dharmasraya.

Kepadatan Penduduk

Tabel 4 Data Kepadatan Penduduk Kab. Dharmasraya Tahun 2020-2024

TAHUN	ANGKA (RIBU)
2020	228
2021	232
2022	236
2023	240
2024	244

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebanyak 228 ribu orang. Lalu, di tahun 2021 naik menjadi 232 ribu orang, pada tahun 2022 naik menjadi 236 ribu orang. Tahun 2023 jumlah penduduk mencapai 240 ribu orang, dan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 245 ribu orang. Data ini menunjukkan adanya tren pertumbuhan penduduk yang konsisten setiap tahun di Kabupaten Dharmasraya selama periode 2020 hingga 2024.

Berdasarkan data-data diatas dapat dikatakan Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren positif dalam pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan pertumbuhan penduduk yang stabil selama periode 2020–2024. Nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya meningkat signifikan dari Rp10,24 triliun pada 2020 menjadi Rp14,33 triliun pada 2024, dengan PDRB per kapita yang juga naik dari Rp 44,98 juta menjadi Rp58,72 juta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,30 pada 2022, tertinggi di antara daerah pemekaran baru, dan angka kemiskinan turun dari 6,67% di tahun 2021 menjadi 5,56% pada tahun 2022. Namun, terdapat sedikit kenaikan Gini Ratio dari 0,287 di tahun 2022 berjalan hingga tahun 2023 dengan angka 0,291, yang disimpulkan adanya potensi peningkatan ketimpangan pendapatan Kabupaten Dharmasraya.

Kemudian jika melihat data pendidikan, rata-rata lama sekolah naik dari 8,46 tahun (2019) menjadi 8,71 tahun (2024), dengan partisipasi pendidikan dasar dan menengah yang terus membaik. Jumlah penduduk juga bertambah dari 228 ribu (2020) ke 245 ribu (2024), sehingga kebutuhan pelayanan dasar ikut meningkat.

KESIMPULAN

Adapun hal yang terpenting pada Kabupaten Dharmasraya ini memiliki jalur pertumbuhan yang cukup baik, akan tetapi dengan adanya tantangan ketimpangan, kualitas SDM, dan kebutuhan layanan dasar yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk, pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya harus mengatasi dengan perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu fokus terhadap pemerataan hasil pembangunan, peningkatan kualitas SDM, penguatan sektor ekonomi unggulan, pengelolaan pertumbuhan penduduk, serta tata kelola yang lebih baik yang bertujuan terhadap kesejahteraan masyarakat yang dapat meningkat terus menerus secara merata.

Arah Perencanaan Pembangunan yang Disarankan di Kabupaten Dharmasraya:

1. *Pemerataan Hasil Pembangunan dan Pengurangan Ketimpangan*

Pemerintah daerah di Kabupaten Dharmasraya sangat perlu mengarahkan program-program pembangunan yang berorientasi pada pemerataan, misalnya, seperti penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan akses terhadap masyarakat miskin dalam layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Tentunya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia sangat bergantung pada pertumbuhan pendidikan yang adil dan berkualitas tinggi. Seluruh pemangku kepentingan dalam proses pendidikan harus dilibatkan dalam upaya terkoordinasi dan berjangka panjang untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Memperjuangkan hak setiap anak atas pendidikan berkualitas tinggi dan jangka panjang sangat penting untuk mencapai pemerataan pembangunan melalui pendidikan. Hal ini dapat

dicapai dengan inisiatif termasuk meluncurkan kampanye dan program penjangkauan untuk meningkatkan kesadaran akan nilai pendidikan, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan. Pengambilan keputusan, dan menyiapkan infrastruktur dan fasilitas yang sesuai untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat. (Maula et al., 2023)

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan IPM Indonesia tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya-upaya tersebut meliputi peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (Ningrum, 2017).

IPM di Kabupaten Dharmasraya fokus selanjutnya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan menengah dan tinggi di daerah Kabupaten Dharmasraya ini, serta perlunya pengembangan keterampilan kerja yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Pemerintah juga perlu memperluas akses pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan mendorong kolaborasi dengan dunia usaha yang bertujuan untuk lulusan siap kerja dan mampu bersaing.

3. Penguatan Sektor Ekonomi Unggulan dan Diversifikasi

Melakukan pengoptimalisasian terhadap potensi sumber daya alam (perkebunan, pertanian, dan kehutanan) yang harus dibarengi dengan diversifikasi ekonomi, seperti pengembangan industri pengolahan, pariwisata berbasis alam, dan ekonomi kreatif. Investasi pada infrastruktur pendukung (jalan, irigasi, TIK) juga sangat penting dalam membuka akses pasar dalam peningkatan produktivitas di Kabupaten Dharmasraya.

Bahwa setiap pembangunan daerah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakatnya memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang di perlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. (Syafrijal, 2008)

4. Pengelolaan Pertumbuhan Penduduk dan Layanan Dasar

Dengan cukup tingginya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Dharmasraya, pemerintah harus memastikan adanya ketersediaan serta kualitas layanan dasar yang cukup mendukung seperti air bersih, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan. Adanya perencanaan tata ruang yang adaptif terhadap pertumbuhan penduduk dan urbanisasi juga sangat perlu diperkuat yang memiliki tujuan agar tidak terjadi tekanan pada lingkungan dan infrastruktur.

5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipasi Publik

Adpun efektivitas perencanaan pembangunan yang sangat dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah daerah sangat perlu meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi, serta membuka ruang partisipasi masyarakat disaat perumusan dan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Dharmasraya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Cahyat, Gönner, C, and M Haug. (2007). Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia, (Bogor: CIFOR Indonesia,), 2.
- Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Tahunan, Berbagai Tahun Penerbitan
- Badan Pusat Statistik. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Berbagai Tahun Penerbitan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya. (2020-2024). Kabupaten Dharmasraya dalam Angka (berbagai tahun). Dharmasraya: BPS.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dharmasraya. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021–2026
- .Depdiknas. (2003). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.
- Kemendiknas. (2010). Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Statistik Pendidikan Nasional. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). Pedoman Umum Perencanaan Pembangunan Daerah Berkelanjutan. Jakarta: Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2016). Pedoman Umum Perencanaan Pembangunan Daerah Berkelanjutan. Jakarta: Bappenas
- LinovHR, A. (2022). Cara Membangun Pola Pikir Pertumbuhan di Lingkungan Kerja. Penggajian, ESS, dan Manajemen Bakat.
- Maula, I., Irwandi, I., Sari, A. L., Sarimin, D. S., & Rondonuwu, R. H. (2023). Pendidikan untuk pemerataan pembangunan: Memperjuangkan hak semua anak. *Journal on Education*, 5(4), 13153-13165.
- Ningrum, S. S.(2017). Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184-192.
- Saryono. 2010, Metode penelitian kualitatif, PT. Alfabeta, Bandung.
- Sjafrizal, 2008. “Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi”. Padang: Baduose Media.2008
- Suharto, Edi, 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama
- Sumarsono, S. (2010). Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson Education